

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kinerja

Menurut Stephen P. Robbins dalam I Gusti (2010:40) kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Menurut Moeheriono (2010:61) pengertian atau definisi kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tahap pengendalian kinerja dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing kementerian/lembaga (pada pemerintah pusat), dan pimpinan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (pada pemerintah daerah). sedangkan pada tahap pengukuran, dilakukan perbandingan antara hasil yang direncanakan dan hasil yang sebenarnya (aktual). Hal ini diperlukan untuk memastikan tercapainya pengeluaran yang tidak melebihi anggaran dan kegiatan yang direncanakan telah mencapaisasarannya.

Salah satu panduan pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut ketentuan ini, pengukuran kinerja meliputi, tahap penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang terdiri atas indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Pengumpulan data kinerja untuk indikator *input*, *output*, dan *outcome* dilakukan setiap tahun untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektivitas, dan mutu pencapaian sasaran. Sementara itu pengumpulan data kinerja untuk indikator *benefit* dan *impact* dapat dilakukan pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pada pelaporan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi publik. Akuntabilitas pemerintah dibidang keuangan diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, pemerintah telah menetapkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat ini telah terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintah.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat di jelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sementara itu menurut IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dibentuk pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara dalam yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara.

Menurut Rahardjo (2011:29) keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD.

Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada kepala daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, prinsip otonomi dilaksanakan dengan nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Agar prinsip otonomi dapat dilaksanakan dengan nyata dan bertanggung jawab, dapat dinilai atas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga dalam pembahasannya banyak memaparkan mengenai keuangan daerah, penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD dibahas tentang struktur APBD yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan yang

dimaksud dengan satu kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan Rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Sedangkan penetapan APBD membahas tentang proses penyampaian rancangan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Bila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut, selanjutnya disampaikan kembali kepada DPRD. Menurut Rahardjo (2010) pelaksanaan APBD ada beberapa pembahasan yang ditetapkan antara lain, yaitu:

1. Penerimaan dan pengeluaran APBD
2. Pengelolaan barang daerah
3. Akuntansi keuangan pemerintah daerah
4. Perhitungan APBD
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah
6. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah
7. Kerugian keuangan daerah

Penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat wajib disampaikan laporan pertanggung jawaban untuk menilai pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Alat untuk mengukur pencapaian kinerja keuangan pemerintah adalah dengan menganalisis rasio APBD.

Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk analisis rasio APBD berdasarkan data keuangan APBD antara lain:

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007:234). Rumus untuk menghitung rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 REKD

Kriteria rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Efisien	<100%
Efisiensi Berimbang	=100%
Tidak Efisien	>100%

Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Sumber : Mahsun (2009:187)

2. Rasio Belanja Modal

Menurut Deddi (2009: 40) belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Menurut Nurlan (2008: 48) belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan pembangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Rumus untuk menghitung rasio belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\text{RBM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rumus 2.2 RBM

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

2.1.4 Investasi

Menurut PSAK Nomor 13 Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, investasi adalah suatu asset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalty, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Menurut Abdul Halim dalam (Fahmi, 2010:2) investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) disemua sektor-sektor ekonomi (Mafizatul dalam jurnal).

Adapun tujuan dari investasi menurut (Irham, 2010:3) yaitu:

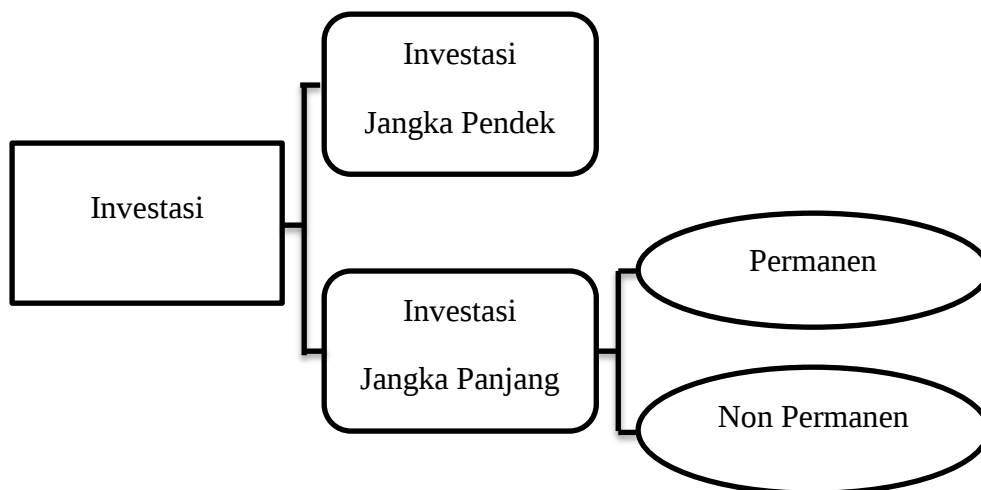
1. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut,
2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*actual profit*),
3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham,
4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.1.5 Investasi Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 8 Tahun 2007 Pasal 1 No. 1 investasi pemerintah daerah adalah penetapan sejumlah dana/atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, social, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Menurut PSAP 6 mendefinisikan investasi sebagai asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat social, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, investasi pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok asset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok asset nonlancar.



Gambar 2.1 Jenis Investasi Pemerintah

1. Investasi Jangka Pendek

Karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu investasi dikategorikan sebagai investasi jangka pendek adalah:

- a. Dapat diperjualbelikan/dicairkan dengan segera.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
- c. Berisiko rendah.

Yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito jangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas (12) bulan. Penyertaan modal Pemda, investasi dalam Surat Utang Negara, dan pembelian Obligasi merupakan beberapa contoh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, pelepasan investasi jangka panjang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Permanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen terkadang juga dilakukan untuk menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

1. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Penyertaan modal dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas (PT) dan nonsurat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
2. Investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Nonpermanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanent yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat kewajiban jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah.
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dialihkan kepada pihak ketiga.
3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
4. Investasi nonpermanent lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi oleh pemerintah apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Secara umum, investasi yang diperoleh pemerintah diukur berdasarkan nilai perolehannya. Jika investasi tersebut tidak memiliki nilai perolehan, maka yang digunakan adalah nilai wajarnya. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penetapan nilai wajar, sedangkan investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Dalam investasi pemerintah terdapat metode penilaian investasi jangka panjang pemerintah yang mana dipengaruhi oleh porsi kepemilikan dalam badan usaha investee, yaitu:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya kepemilikan investee kurang dari 20%, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas kepemilikan investee berkisar 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50%. Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan kemudian ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba, kecuali dividen, dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi adalah untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat (Rahardjo, 2010:26).

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu (Iskandar, 2013:411), sedangkan menurut Schumpeter yang dikutip oleh Iskandar (2013:411), pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan.

Aliran klasik membagi teori pertumbuhan ekonomi modern menjadi dua yaitu menekankan pentingnya akumulasi modal (*physical capital formation*) dan peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital*), sehingga berdampak pada penekanan aspek penawaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut model Harrod-Domar dalam Lincoln Arsyad yang dikutip oleh Rahardjo (2010:25), pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat tabungan (investasi) dan Produktivitas kapital (*capital output ratio*). Agar dapat tumbuh secara berkelanjutan, masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar tabungan, makin besar investasi dan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu Negara/daerah. Sebaliknya makin rendah produktivitas kapital (modal) atau semakin tinggi *capital output ratio*, maka makin rendah pertumbuhan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan sebagai penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayati (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013”. Menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisiensi, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan besarnya bantuan pusat dan propinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana yang digunakan untuk belanja operasi daripada modal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa (2014) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”. Menyatakan bahwa variabel desentralisasi fiskal dan fiscal stress secara tidak langsung berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah, dan variabel kinerja keuangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Putri Wahyuni, ddk (2014) dengan judul “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali”. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mafizatul Nurhayati (2015) dengan judul “Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Propinsi Tahun 2008-2013. Menyatakan bahwa efek positif pada otonomi fiskal pertumbuhan ekonomi daerah. Efek lokal investasi pemerintah yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. pendapatan per kapita dan angkatan kerja daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	Variabel: • Rasio Kemandirian Keuangan Daerah • Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah • Rasio Efisiensi • Rasio Keserasian • Rasio Pertumbuhan • Rasio DSCR	Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisiensi, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.
2	Sang Made Muryawan, Made Sukarsa (2014)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Variabel Independen: • Desentralisasi Fiskal • Fiscal Stress • Kinerja Keuangan Variabel Dependen: • Pertumbuhan Ekonomi	Variabel desentralisasi fiskal dan fiscal stress berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah, variabel kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi.

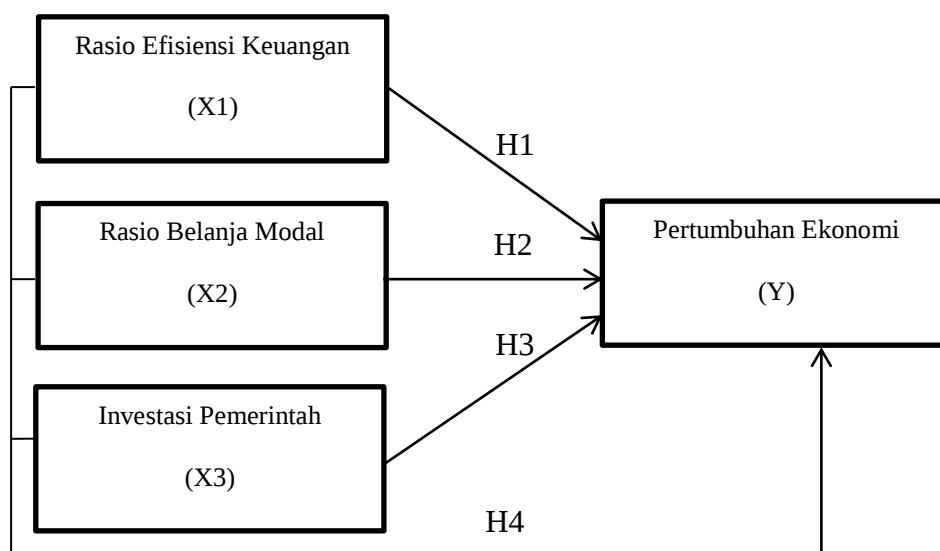
Tabel 2.2 Lanjutan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
4	I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi (2014)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Variabel Independen: • Pengeluaran Pemerintah • Investasi Variabel Dependen: • Pertumbuhan Ekonomi • Kesenjangan Pendapatan	pengeluaran pemerintah dan investasi dari tahun 2000-2012 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan kab/kota di Provinsi Bali.
5	Mafizatul Nurhayati (2015)	Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Propinsi Tahun 2008-2013	Variabel Independen: • Kemandirian Fiskal • Investasi Daerah • Pendapatan per Kapita • Angkatan Kerja Variabel Dependen: • Pertumbuhan Ekonomi	Efek positif pada otonomi fiskal pertumbuhan ekonomi daerah. Efek lokal investasi pemerintah yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. pendapatan per kapita daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Angkatan kerja tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja yang dapat digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan system pemerintahan daerah. kemajuan suatu daerah dapat ditinjau dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah serta investasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara skematis kerangka pemikiran penelitian dikembangkan dalam sebuah model dibawah ini.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang sebenarnya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang dicari atau ingin dipelajari. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menetapkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Rasio efisiensi keuangan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

H_2 : Rasio belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

H_3 : Investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

H_4 : Rasio efisiensi keuangan pemerintah, rasio belanja modal, dan investasi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.